

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2024

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

Atas nama Dewan Direksi kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Tri Susanto
Alamat Kantor : Gedung Prudential Centre, Lantai 11 Unit A B C D E, Kota Kasablanka
Jl. Casablanca Raya Kav.88
Jakarta Selatan
Alamat Domisili : Jl. KP Buaran III RT/RW 005/015 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Nomor Telepon : (021) 6912547
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Didik Sukristiyo Yuwono
Alamat Kantor : Gedung Prudential Centre, Lantai 11 Unit A B C D E, Kota Kasablanka
Jl. Casablanca Raya Kav.88
Jakarta Selatan
Alamat Domisili : Jl. Pratista Blok E-10, RT/RW 003/018 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani, Bandung
Nomor Telepon : (021) 6912547
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

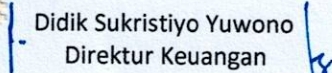
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi:

Jakarta, 4 Juni 2025



Tri Susanto
Direktur Utama



Didik Sukristiyo Yuwono
Direktur Keuangan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JAKARTA,
4 Juni 2025

Firman Sababalat, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.1789



Pelayaran Bahtera Adhiguna
00983/2.1457/AU.1/02/1789-4/1/VI/2025

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	1.275.499	439.055
Piutang usaha	5	656.529	1.534.397
Piutang non-usaha	6	47.558	127.962
Uang muka dan biaya dibayar di muka		15.448	26.820
Persediaan	7	139.548	110.661
Piutang sewa pembiayaan, bagian lancar	8	83.189	118.029
Pajak dibayar di muka, bagian lancar	21a	38.008	13.835
Jumlah aset lancar		<u>2.255.779</u>	<u>2.370.759</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang sewa pembiayaan, bagian tidak lancar	8	657.437	816.470
Aset tetap	9	2.034.672	1.566.216
Aset hak guna	10	1.051.845	1.305.624
Investasi pada entitas asosiasi	11	51.628	41.293
Pajak dibayar di muka, bagian tidak lancar	21a	5.625	5.625
Jumlah aset tidak lancar		<u>3.801.207</u>	<u>3.735.228</u>
JUMLAH ASET		<u><u>6.056.986</u></u>	<u><u>6.105.987</u></u>

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	12	242.726	703.555
Utang lain-lain	13	27.198	47.725
Biaya yang masih harus dibayar	14	227.279	75.173
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	15	87.300	85.254
Liabilitas sewa, jangka pendek	16	600.450	484.889
Utang pajak	21b	35.353	44.996
Liabilitas imbalan pascakerja, jangka pendek		<u>626</u>	<u>666</u>
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>1.220.932</u>	<u>1.442.258</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	15	576.999	664.299
Liabilitas imbalan pascakerja, jangka panjang		8.519	4.299
Liabilitas sewa, jangka panjang	16	<u>1.325.260</u>	<u>1.791.447</u>
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>1.910.778</u>	<u>2.460.045</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>3.131.710</u>	<u>3.902.303</u>
EKUITAS			
Modal saham:			
Modal dasar 86.696 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh			
21.675 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh)			
per lembar saham	17	21.675	21.675
Tambahan modal disetor	18	33.406	33.406
Saldo laba			
- Dicadangkan		2.875	2.875
- Tidak dicadangkan		<u>2.867.320</u>	<u>2.145.728</u>
Jumlah ekuitas		<u>2.925.276</u>	<u>2.203.684</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>6.056.986</u>	<u>6.105.987</u>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PENDAPATAN USAHA	19	5.881.794	5.915.550
BEBAN POKOK PENDAPATAN	20	<u>(4.569.728)</u>	<u>(4.693.591)</u>
LABA BRUTO		1.312.066	1.221.959
Beban umum dan administrasi	20	(133.532)	(114.867)
Beban keuangan	22	(246.002)	(231.082)
Penghasilan keuangan		19.396	5.586
Bagian laba entitas asosiasi	11	18.283	13.464
(Beban)/penghasilan lain-lain, bersih		<u>(6.052)</u>	<u>10.572</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		964.159	905.632
Beban pajak penghasilan	21c	<u>(5.721)</u>	<u>(3.890)</u>
LABA TAHUN BERJALAN		<u>958.438</u>	<u>901.742</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak		(29)	(383)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan pascakerja, setelah pajak		<u>(1.817)</u>	<u>(545)</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u><u>956.592</u></u>	<u><u>900.814</u></u>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	Modal saham	Tambah modal disetor	Saldo laba		Jumlah ekuitas
			Dicadangkan	Tidak dicadangkan	
Saldo 1 Januari 2023	<u>21.675</u>	<u>33.406</u>	<u>2.875</u>	<u>1.244.914</u>	<u>1.302.870</u>
Laba tahun berjalan	-	-	-	901.742	901.742
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak	-	-	-	(383)	(383)
Pengukuran kembali atas program imbalan pascakerja, setelah pajak	-	-	-	(545)	(545)
Saldo 31 Desember 2023	<u>21.675</u>	<u>33.406</u>	<u>2.875</u>	<u>2.145.728</u>	<u>2.203.684</u>
Laba tahun berjalan	-	-	-	958.438	958.438
Dividen	-	-	-	(235.000)	(235.000)
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak	-	-	-	(29)	(29)
Pengukuran kembali atas program imbalan pascakerja, setelah pajak	-	-	-	(1.817)	(1.817)
Saldo 31 Desember 2024	<u>21.675</u>	<u>33.406</u>	<u>2.875</u>	<u>2.867.320</u>	<u>2.925.276</u>

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba sebelum pajak penghasilan	964.159	905.632
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan aset tetap	229.204	175.788
Penyusutan aset hak-guna	444.983	282.477
Beban keuangan	246.002	231.082
Imbalan pascakerja	2.878	(278)
Bagian laba entitas asosiasi	(18.283)	(13.464)
Penghasilan keuangan	<u>(19.396)</u>	<u>(5.586)</u>
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	<u>1.849.547</u>	<u>1.575.651</u>
Perubahan modal kerja:		
Piutang usaha	877.868	(272.192)
Piutang non-usaha	80.404	(19.127)
Persediaan	(28.887)	(50.776)
Pajak dibayar di muka	(24.173)	(10.563)
Uang muka dan biaya dibayar di muka	11.372	216.222
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	600
Utang usaha	(460.829)	(79.952)
Utang pajak	(9.643)	398
Utang lain-lain	(20.527)	(17.576)
Piutang sewa pembiayaan	193.873	111.091
Biaya yang masih harus dibayar	<u>69.082</u>	<u>4.094</u>
Arus kas operasi sesudah perubahan modal kerja	2.538.087	1.457.870
Pembayaran pajak penghasilan	(3.808)	(3.863)
Penerimaan pengembalian atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB")	-	31.354
Pembayaran imbalan pascakerja	(515)	(403)
Penerimaan bunga	19.396	5.586
Pembayaran bunga	<u>(242.166)</u>	<u>(215.320)</u>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>2.310.994</u>	<u>1.275.224</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(697.660)	(762.444)
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	<u>7.919</u>	<u>7.935</u>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(689.741)</u>	<u>(754.509)</u>

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	-	297.606
Pembayaran pinjaman kepada pemegang saham	(85.254)	(240.304)
Pembayaran liabilitas sewa	(464.555)	(301.162)
Pembayaran untuk <i>Notional Pooling</i>	-	(399.420)
Pembayaran dividen kepada pemegang saham	<u>(235.000)</u>	<u>-</u>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(784.809)</u>	<u>(643.280)</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	836.444	(122.565)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>439.055</u>	<u>561.620</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u><u>1.275.499</u></u>	<u><u>439.055</u></u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM**a. Pendirian dan informasi umum**

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dengan nama Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara dan merupakan kelanjutan usaha dari perusahaan maritim milik Belanda, N.V. Nederland Indonesie Steenkolen Handel Maatschap-pij ("NISHM") Tanjung Priok yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1971, nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Negara Bahtera Adhiguna dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1971. Berdasarkan akta No.34 tanggal 30 Desember 1971 dari Soeleman Ardjasmita, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.J.A.5/63/23 tanggal 11 Agustus 1972, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.8 tanggal 26 Januari 1973, Tambahan No.58.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No.50 tanggal 23 Desember 2019 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0002103.AH.01.02 tanggal 10 Januari 2020.

Berdasarkan akta No.75 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, tentang:

1. Persetujuan pengalihan saham PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") sejumlah 21.674 saham atau setara 99.99% dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan kepada PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI") melalui penyertaan modal non tunai (*inbreng*);
2. Persetujuan pengambilalihan Perusahaan oleh PLN EPI sebagai akibat dari penyertaan modal non tunai (*inbreng*).

Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0000027 tanggal 1 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000016.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 1 Januari 2023. Keputusan ini efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Perusahaan bergerak dalam bidang transportasi bahan tambang serta layanan jasa dermaga. Entitas induk Perusahaan adalah PLN EPI.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Gedung Prudential Centre, lantai 11 Unit A B C D E Kota Kasablanka Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang penyelenggaraan jasa angkutan laut, terutama di angkutan laut dan usaha-usaha lainnya yang menunjang tercapainya tujuan perkembangan Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah karyawan tetap Perusahaan sebanyak 46 (2023: 52) dan karyawan tidak tetap sebanyak 143 (2023: 86) (tidak diaudit).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)**b. Lain-lain**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No.28 tanggal 27 Maret 2023 dari Muhammad Hanafi, S.H. dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.09-0104661 tanggal 29 Maret 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Sapto Aji Nugroho
Komisaris	: Stefanus Sugeng Wardoyo
Komisaris	: Hendri Ginting
Komisaris	: Bayu Adjie Megananda
Direktur Utama	: Tri Susanto
Direktur Keuangan	: Didik Sukristiyo Yuwono
Direktur Operasi	: Idaman
Direktur Perencanaan dan Niaga	: Arif Yudianto

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Untuk memberi pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa *item* pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 116 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 117 "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan;
- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)
b. Penjabaran mata uang asing
i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang dimuat dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp" atau "IDR") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs Jisdor yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	<u>2024*)</u>	<u>2023*)</u>
Dolar Amerika Serikat ("AS\$")	16.157	15.439

*) Dalam jumlah penuh

c. Transaksi pihak-pihak berelasi

Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Saldo dan transaksi yang material antara Perusahaan dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Perusahaan memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

d. Aset keuangan
i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi),

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**d. Aset keuangan (lanjutan)****i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)**

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kas tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Terdapat tiga kategori pengukuran dimana Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari instrumen utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan keuangan dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, dimana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi pada nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan keuangan dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam beban lain-lain, bersih. Penghasilan keuangan dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam penghasilan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs dan beban penurunan nilai disajikan pada beban lain-lain, bersih.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**d. Aset keuangan (lanjutan)****i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)**Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam beban lain-lain, bersih dalam periode kemunculannya.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

e. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE"). Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang non-usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**f. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan (jika ada), dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

g. Piutang usaha dan non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi usaha biasa, jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak demikian, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Ketika piutang usaha atau piutang non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Keberhasilan penagihan kembali di kemudian hari atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan pada laba rugi.

h. Persediaan

Suku cadang dan bahan bakar dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Suku cadang dan bahan bakar dicatat sebagai biaya produksi pada saat digunakan.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

i. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Perusahaan menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK 216, "Aset tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)
i. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
<i>Docking</i> kapal	2,5
Kapal dan tongkang	10-25
Peralatan operasional	5
Kendaraan	5
Perlengkapan kantor	5

Masa manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2j).

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Nilai kapal termasuk biaya *docking* dikapitalisasi pada saat terjadinya dan didepresiasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan *docking* berikutnya.

Pekerjaan dalam pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Untuk tujuan menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

Aset non-keuangan, selain *goodwill*, yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**j. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)**

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

Beban dan pemulihan penurunan nilai disajikan secara terpisah dalam laba rugi, setelah penyajian laba usaha.

k. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan sebagai pemberi sewa

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pemberi sewa, Perusahaan akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pendapatan sewa dari kegiatan operasi sewa Perusahaan bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Perusahaan sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu, yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari dua hingga 14 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal dimana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**k. Sewa (lanjutan)****Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)**

Aset hak guna didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- Harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti untuk penghentian sewa, kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan awal.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, dimana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan:

- Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- Menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Perusahaan, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak-guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap tahun.

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- Biaya langsung awal; dan
- Biaya restorasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**k. Sewa (lanjutan)****Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)**

Aset hak-guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak-guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 2j).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi perpanjangan dan terminasi

Opsi perpanjangan dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Perusahaan. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- Mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

- Menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau sepenuhnya sewa tersebut.
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**k. Sewa (lanjutan)****Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)**Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Perusahaan terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Perusahaan bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

Subsewa

Perusahaan sebagai penyewa aset tetap tertentu juga menyewakan kembali aset tetap tersebut ke penyewa. Dalam transaksi ini, Perusahaan bertindak sebagai *intermediate lessor*. Ketika *intermediate lessor* melakukan transaksi subsewa, *intermediate lessor*:

- Menghentikan pengakuan aset hak-guna untuk aset tetap tertentu yang disewakan kembali ke penyewa dan mengakui piutang sewa pembiayaan.
- Mengakui selisih antara aset hak-guna dan piutang sewa pembiayaan tersebut di laba rugi.
- Tetap mengakui liabilitas sewa yang berhubungan dengan aset tetap tertentu tersebut.
- Mengakui penghasilan keuangan dari subsewa dan beban keuangan dari sewa utamanya selama periode subsewa.

l. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok di luar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

m. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**m. Pinjaman (lanjutan)**

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak diselesaikan, dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

n. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada tahun dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

o. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Perusahaan memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

(i) Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi dengan bagian Perusahaan atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**o. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)****(ii) Metode ekuitas**

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Perusahaan atas rugi entitas asosiasi dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dalam entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Jika bukti tersebut ada, maka Perusahaan menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

(iii) Pelepasan

Investasi pada entitas asosiasi dihentikan pengakuannya apabila Perusahaan tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dan investasi yang tersisa diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

p. Pengakuan pendapatan dan beban**Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan**

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

- i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut: (lanjutan)

- iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
- v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan dari jasa penyewaan kapal dan keagenan diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut diberikan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

q. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan kelompok kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar sehubungan dengan setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat terdapat kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**r. Perpajakan**Pajak penghasilan final

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagian besar pendapatan Perusahaan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dimana beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan di luar pajak final

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara dimana Perusahaan beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

s. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas.

Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**t. Dividen**

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan perusahaan dalam tahun ketika pembagian dividen telah diumumkan.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Perusahaan telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu selama perhitungan estimasi pajak penghasilan untuk Perusahaan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam tahun penentuan pajak tersebut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Estimasi masa manfaat dan nilai sisa aset tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan nilai sisa berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan nilai sisa adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun, terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perusahaan mengestimasi masa manfaat aset tetap antara 2,5 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Provisi atas KKE piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung KKE piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Perusahaan yang diobservasi. Perusahaan akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kas	367	401
Kas di bank	<u>1.275.132</u>	<u>438.654</u>
Jumlah	<u>1.275.499</u>	<u>439.055</u>

Lihat Catatan 23 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA**a. Berdasarkan pelanggan**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pihak berelasi	574.108	1.470.403
Pihak ketiga	95.313	76.886
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(12.892)</u>	<u>(12.892)</u>
Jumlah pihak ketiga - bersih	<u>82.421</u>	<u>63.994</u>
Jumlah piutang usaha - bersih	<u>656.529</u>	<u>1.534.397</u>

b. Berdasarkan umur

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Belum jatuh tempo	642.920	1.408.962
Lewat jatuh tempo		
1 s/d 90 hari	8.362	94.895
91 s/d 360 hari	1.915	30.540
Lebih dari 360 hari	<u>16.224</u>	<u>12.892</u>
	669.421	1.547.289
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(12.892)</u>	<u>(12.892)</u>
Jumlah piutang usaha - bersih	<u>656.529</u>	<u>1.534.397</u>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari piutang usaha tersebut. Manajemen juga berpendapat tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan.

Lihat Catatan 23 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. PIUTANG NON-USAHA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pihak berelasi	40.573	108.584
Pihak ketiga	15.488	27.881
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(8.503)</u>	<u>(8.503)</u>
Jumlah pihak ketiga - bersih	<u>6.985</u>	<u>19.378</u>
Jumlah piutang non-usaha - bersih	<u>47.558</u>	<u>127.962</u>

Piutang non-usaha pihak berelasi terutama terdiri atas transaksi yang dapat ditagih kembali (*back charges*).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup, untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari piutang non-usaha tersebut. Manajemen juga berpendapat tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan.

Lihat Catatan 23 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERSEDIAAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bahan bakar dan pelumas	122.348	103.295
Suku cadang	<u>17.200</u>	<u>7.366</u>
Jumlah	<u>139.548</u>	<u>110.661</u>

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan. Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai persediaan secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Pada tahun 2011, Perusahaan menyewakan kapal milik PT Jaya Samudra Karunia Shipping ("JSK") untuk melaksanakan jasa transportasi laut pengangkutan batubara kepada PLN unit Tanjung Jati B ("PLN TJB") melalui mekanisme subsewa yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Pada tahun 2024, Perusahaan mengalihkan penggunaan kapal milik JSK dengan kapal milik Perusahaan. Atas dampak dari kejadian tersebut, Perusahaan mengklasifikasikan kembali sisa piutang sewa pembiayaan kepada PLN TJB sebesar Rp92.521 menjadi aset hak guna senilai Rp52.136. Selisih dari transaksi tersebut dibukukan sebagai beban lain-lain dalam laporan laba rugi Perusahaan.

Pada tahun 2021, Perusahaan menyewakan dua buah kapal milik PT Lumoso Pratama Line ("Lumoso") dan PT Indah Bima Prima ("IBP") kepada PLN TJB melalui mekanisme subsewa. Mengacu kepada kontrak sewa dengan Lumoso dan IBP, masa sewa akan berakhir pada 30 Juni 2031.

Analisis jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan neto adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Piutang sewa bruto:		
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	159.840	235.962
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	639.360	728.649
Jatuh tempo dalam waktu lebih dari lima tahun	<u>239.759</u>	<u>399.600</u>
	1.038.959	1.364.211
Dikurangi: pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(298.333)</u>	<u>(429.712)</u>
Piutang sewa neto	<u>740.626</u>	<u>934.499</u>
Dikurangi: bagian lancar	<u>(83.189)</u>	<u>(118.029)</u>
Bagian tidak lancar	<u>657.437</u>	<u>816.470</u>

Lihat Catatan 24 untuk rincian perjanjian penting.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

	2024			
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Tanah	2.966	-	-	2.966
Bangunan	6.812	-	-	6.812
Kapal dan tongkang	2.677.218	655.629	-	3.332.847
Peralatan operasional	84	-	-	84
Kendaraan	1.415	-	-	1.415
Perlengkapan kantor	4.263	19.162	-	23.425
Subjumlah	2.692.758	674.791	-	3.367.549
Pekerjaan dalam pelaksanaan	-	22.869	-	22.869
Jumlah	2.692.758	697.660	-	3.390.418
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	(3.779)	(240)	-	(4.019)
Kapal dan tongkang	(1.117.001)	(228.876)	-	(1.345.877)
Peralatan operasional	(84)	-	-	(84)
Kendaraan	(1.415)	-	-	(1.415)
Perlengkapan kantor	(4.263)	(88)	-	(4.351)
Jumlah	(1.126.542)	(229.204)	-	(1.355.746)
Jumlah tercatat	1.566.216			2.034.672
	2023			
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Tanah	2.966	-	-	2.966
Bangunan	6.812	-	-	6.812
Kapal dan tongkang	1.912.952	758.880	5.386	2.677.218
Peralatan operasional	84	-	-	84
Kendaraan	1.415	-	-	1.415
Perlengkapan kantor	4.263	-	-	4.263
Subjumlah	1.928.492	758.880	5.386	2.692.758
Pekerjaan dalam pelaksanaan	1.822	3.564	(5.386)	-
Jumlah	1.930.314	762.444	-	2.692.758
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	(3.506)	(273)	-	(3.779)
Kapal dan tongkang	(941.545)	(175.456)	-	(1.117.001)
Peralatan operasional	(84)	-	-	(84)
Kendaraan	(1.415)	-	-	(1.415)
Perlengkapan kantor	(4.204)	(59)	-	(4.263)
Jumlah	(950.754)	(175.788)	-	(1.126.542)
Jumlah tercatat	979.560			1.566.216

Beban penyusutan dialokasikan sebagai beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi (Catatan 20) pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp229.204 dan Rp175.788.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tahun 2024, aset tetap Perusahaan diasuransikan terhadap risiko kerugian, kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp2.539.161 (2023: Rp3.959.002). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

10. ASET HAK GUNA

	2024				
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan					
Gedung	7.206	-	-	-	7.206
Kapal dan tongkang	1.579.575	162.674	52.136	(106.774)	1.687.611
Kendaraan	2.826	1.336	-	(1.270)	2.892
Jumlah	1.589.607	164.010	52.136	(108.044)	1.697.709
Akumulasi penyusutan					
Gedung	(2.161)	(2.632)	-	-	(4.793)
Kapal dan tongkang	(279.694)	(441.350)	-	81.832	(639.212)
Kendaraan	(2.128)	(1.001)	-	1.270	(1.859)
Jumlah	(283.983)	(444.983)	-	83.102	(645.864)
Jumlah tercatat	1.305.624				1.051.845
	2023				
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan					
Gedung	4.788	2.418	-	-	7.206
Kapal dan tongkang	362.727	1.271.784	-	(54.936)	1.579.575
Kendaraan	3.061	-	-	(235)	2.826
Jumlah	370.576	1.274.202	-	(55.171)	1.589.607
Akumulasi penyusutan					
Gedung	(133)	(2.028)	-	-	(2.161)
Kapal dan tongkang	(27.292)	(279.870)	-	27.468	(279.694)
Kendaraan	(1.700)	(579)	-	151	(2.128)
Jumlah	(29.125)	(282.477)	-	27.619	(283.983)
Jumlah tercatat	341.451				1.305.624

Beban penyusutan dialokasikan sebagai beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi (Catatan 20) pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp444.983 dan Rp282.477.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Entitas	Domisili	Jenis usaha	Tahun operasi komersial	Persentase penyertaan	
				2024	2023
Entitas asosiasi					
PT Adhi Guna Putera ("AGP")	Jakarta	Pelayaran	1987	24,98%	24,98%

AGP bergerak di bidang pengusahaan kegiatan pelabuhan dan berdomisili di Jakarta. AGP mulai melakukan operasi komersil pada tahun 1987.

AGP merupakan Perusahaan tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip dan tersedia untuk saham entitas asosiasi tersebut.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2024	Dividen	Bagian atas laba bersih	Bagian atas beban komprehensif lainnya	31 Desember 2024
<u>Entitas asosiasi</u>					
AGP	<u>41.293</u>	<u>(7.919)</u>	<u>18.283</u>	<u>(29)</u>	<u>51.628</u>
	1 Januari 2023	Dividen	Bagian atas laba bersih	Bagian atas beban komprehensif lainnya	31 Desember 2023
<u>Entitas asosiasi</u>					
AGP	<u>36.147</u>	<u>(7.935)</u>	<u>13.464</u>	<u>(383)</u>	<u>41.293</u>

Ringkasan informasi keuangan AGP, entitas asosiasi yang tercatat menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	2024	2023
<u>Aset</u>		
Aset lancar	541.358	364.943
Aset tidak lancar	<u>617.613</u>	<u>510.144</u>
Jumlah	1.158.971	875.087
<u>Liabilitas</u>		
Liabilitas jangka pendek	(458.159)	(324.541)
Liabilitas jangka panjang	<u>(494.136)</u>	<u>(385.242)</u>
Jumlah	(952.295)	(709.783)
Aset bersih	<u>206.676</u>	<u>165.304</u>
% kepemilikan efektif	24,98%	24,98%
Bagian Perusahaan atas aset bersih entitas asosiasi	51.628	41.293

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan AGP, entitas asosiasi yang tercatat menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan	1.007.625	761.925
Harga pokok pendapatan	(726.830)	(570.719)
Beban umum dan administrasi	(141.841)	(105.652)
Pendapatan lain-lain	<u>(41.196)</u>	<u>(8.010)</u>
Laba usaha	97.758	77.544
Beban pajak penghasilan	<u>(24.567)</u>	<u>(23.644)</u>
Laba tahun berjalan	73.191	53.900
(Rugi) komprehensif lain	<u>(118)</u>	<u>(1.534)</u>
Jumlah laba komprehensif	<u><u>73.073</u></u>	<u><u>52.366</u></u>
% kepemilikan efektif	24,98%	24,98%
Bagian Perusahaan atas laba bersih	18.283	13.464
Bagian Perusahaan atas beban komprehensif lainnya	(29)	(383)
Dividen yang terutang oleh entitas asosiasi	7.919	7.935

12. UTANG USAHA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pihak berelasi	<u>88.143</u>	<u>130.718</u>
Pihak ketiga		
PT Pelayaran Nasional Lautan Kumala	13.758	29.298
PT Kapuas Jaya Samudera	11.706	30.708
PT Dharmalancar Sejahtera	10.074	28.115
PT Trans Maritim Pratama	8.478	27.558
PT Patria Maritime Lines	1.886	30.122
PT Pelayaran Marindo Pasific	1.715	42.138
PT Ardila Segara Intan Lines	-	35.821
PT Pelayaran Mana Lagi	-	34.324
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp25.000)	<u>106.966</u>	<u>314.753</u>
Jumlah pihak ketiga	<u>154.583</u>	<u>572.837</u>
Jumlah	<u>242.726</u>	<u>703.555</u>

Lihat Catatan 23 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG LAIN-LAIN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pihak berelasi	8.283	10.611
Pihak ketiga	<u>18.915</u>	<u>37.114</u>
Jumlah	<u>27.198</u>	<u>47.725</u>

Lihat Catatan 23 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Administrasi kapal	154.153	20.828
Bunga	31.903	6.316
Asuransi	21.697	35.375
Bonus dan insentif kerja	15.691	12.339
Lain-lain	<u>3.835</u>	<u>315</u>
Jumlah	<u>227.279</u>	<u>75.173</u>

Lihat Catatan 23 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

15. PINJAMAN JANGKA PANJANG

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Jumlah pokok pinjaman	664.299	749.553
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(87.300)</u>	<u>(85.254)</u>
Bagian jangka panjang	<u>576.999</u>	<u>664.299</u>

Pinjaman ini merupakan pinjaman pemegang saham ("SHL") yang diberikan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

2024					
	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Bagian jatuh tempo dalam satu tahun</u>	<u>Bagian jangka panjang</u>	<u>Tingkat bunga efektif per tahun</u>	<u>Periode</u>
SHL 5	10 Desember 2019	16.124	68.527	8,63%	2019 - 2030
SHL 6	13 Juni 2022	62.986	440.905	8,67%	2022 - 2032
SHL 7	1 November 2023	<u>8.190</u>	<u>67.567</u>	8,65%	2023 - 2034
Total		<u>87.300</u>	<u>576.999</u>		

2023					
	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Bagian jatuh tempo dalam satu tahun</u>	<u>Bagian jangka panjang</u>	<u>Tingkat bunga efektif per tahun</u>	<u>Periode</u>
SHL 5	10 Desember 2019	16.124	84.650	8,63%	2019 - 2030
SHL 6	13 Juni 2022	62.986	503.891	8,67%	2022 - 2032
SHL 7	1 November 2023	<u>6.144</u>	<u>75.758</u>	8,65%	2023 - 2034
Total		<u>85.254</u>	<u>664.299</u>		

Beban keuangan pinjaman SHL tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp62.565 dan Rp65.670 (Catatan 22).

Lihat Catatan 23 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. LIABILITAS SEWA

Pembayaran minimum atas kewajiban sewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jatuh tempo

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:		
Tidak lebih dari satu tahun	763.259	657.778
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	1.341.580	1.789.074
Lebih dari lima tahun	<u>217.324</u>	<u>362.207</u>
Jumlah pembayaran minimum kewajiban sewa	2.322.163	2.809.059
Dikurangi diskonto	<u>(396.453)</u>	<u>(532.723)</u>
Nilai kini pembayaran minimum	1.925.710	2.276.336
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(600.450)</u>	<u>(484.889)</u>
Bagian jangka panjang	<u>1.325.260</u>	<u>1.791.447</u>

Berdasarkan pemberi sewa

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Nilai kini pembayaran minimum sewa		
Lumoso	524.932	600.029
Konsorsium PT Pelita Bara Samudera dan PT Prima Maritim Bahari	376.033	490.266
IBP	362.853	398.975
PT Gurita Lintas Samudera	186.718	227.021
PT Karunia Akses Gemilang	183.875	220.084
Konsorsium PT Adhi Guna Putera dan PT Titan Transport Indonusa	120.547	-
PT Pancaran Samudra Transport	65.186	108.807
JSK	42.351	70.105
PT Cakrawala Nusa Bahari	36.291	75.763
PT Bintang Laut Sejahtera Sembilan Dua	19.106	40.846
PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi	3.919	40.289
Lain-lain	<u>3.899</u>	<u>4.151</u>
Jumlah	<u>1.925.710</u>	<u>2.276.336</u>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(600.450)</u>	<u>(484.889)</u>
Bagian jangka panjang	<u>1.325.260</u>	<u>1.791.447</u>

Arus kas keluar untuk seluruh sewa pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.212.807 dan Rp2.825.825.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan termasuk menyajikan jumlah berkaitan dengan sewa:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban bunga (disajikan sebagai bagian dari beban keuangan)	183.437	165.412
Biaya yang berkaitan dengan sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi)	2.483.989	3.256.671
Biaya yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah yang bukan merupakan sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi)	15.135	5.892

17. MODAL SAHAM

	<u>2024</u>		
	<u>Jumlah saham*)</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Pemegang saham			
PT PLN EPI**)	21.674	99,99%	21.674
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN	<u>1</u>	<u>0,01%</u>	<u>1</u>
Jumlah	<u>21.675</u>	<u>100,00%</u>	<u>21.675</u>

	<u>2023</u>		
	<u>Jumlah saham*)</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Pemegang saham			
PT PLN EPI**)	21.674	99,99%	21.674
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN	<u>1</u>	<u>0,01%</u>	<u>1</u>
Jumlah	<u>21.675</u>	<u>100,00%</u>	<u>21.675</u>

*) Dalam jumlah penuh

**) Berdasarkan Akta Notaris No. 75 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan terjadi persetujuan pengalihan saham PLN sejumlah 21.674 saham atau setara 99.99% dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan kepada PLN EPI melalui penyertaan modal non tunai (*inbreng*).

Cadangan wajib

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib sampai cadangan menjadi paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu tertentu yang ditetapkan untuk pembentukan cadangan wajib tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan belum membentuk cadangan wajib sebesar 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MODAL SAHAM (lanjutan)
Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2024, pemegang saham menyetujui pembagian dividen atas laba bersih tahun 2023 sebesar Rp235.000 dan dibayarkan pada bulan September 2024.

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2008, melalui perjanjian No.A.2420/SP.904/DIRUT/2008, PLN memberikan fasilitas dana talangan (*bridging finance*) kepada Perusahaan dengan jumlah maksimum sebesar Rp30.900 untuk keperluan restrukturisasi Sumber Daya Manusia ("SDM") dan *docking* KM Adhiguna Tarahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengambilalihan/akuisisi seluruh saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan oleh PLN. Terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sampai dengan tanggal selesai dilakukannya proses akuisisi oleh PLN, maka dana talangan yang telah diterima oleh Perusahaan baik sebagian maupun seluruhnya tidak wajib dikembalikan kepada PLN selama proses akuisisi.

Perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui adendum No.A.1067/SP.904/Dirut-2012 tanggal 16 Mei 2012 yang menyatakan antara lain bahwa proses akuisisi Perusahaan oleh PLN telah selesai dan untuk dana talangan yang telah digunakan oleh Perusahaan sebesar Rp33.406 dikonversikan menjadi tambahan penyertaan modal disetor PLN ke Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-State* serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta, kepemilikan saham PLN atas Perusahaan di alihkan kepada PLN EPI sejumlah 21.674 atau setara 99.99% termasuk tambahan modal disetor senilai Rp33.406.

19. PENDAPATAN USAHA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pihak berelasi		
Sewa kapal	5.379.625	5.595.973
Bunga sewa	<u>109.227</u>	<u>138.841</u>
Jumlah pihak berelasi	5.488.852	5.734.814
Pihak ketiga		
Sewa kapal	<u>392.942</u>	<u>180.736</u>
Jumlah	<u>5.881.794</u>	<u>5.915.550</u>

Lihat Catatan 23 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. BEBAN

Beban Perusahaan berdasarkan sifat transaksinya adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Sewa kapal	2.483.989	3.256.671
Bahan bakar dan pelumas	566.791	352.512
Penyusutan aset hak guna (Catatan 10)	444.983	282.477
Bongkar muat	411.207	172.430
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	229.204	175.788
Suku cadang dan kebutuhan kapal lainnya	98.207	81.854
Gaji dan kesejahteraan karyawan	78.617	40.888
Asuransi kapal	73.823	92.871
Jasa manajemen perkapalan	70.768	68.317
Beban pajak final	68.906	69.667
Biaya administrasi kapal	34.626	16.474
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp15.000)	142.139	198.509
Jumlah	<u>4.703.260</u>	<u>4.808.458</u>

Beban tersebut di atas disajikan sebagai berikut dalam laporan laba rugi:

	2024	2023
Beban pokok pendapatan	4.569.728	4.693.591
Beban umum dan administrasi	133.532	114.867
Jumlah	<u>4.703.260</u>	<u>4.808.458</u>

Lihat Catatan 23 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

21. PERPAJAKAN**a. Pajak dibayar di muka**

	2024	2023
Pembayaran di muka atas SKPKB	5.625	5.625
Pajak penghasilan ("PPh") Pasal 15	13.259	13.835
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	24.749	-
Jumlah	<u>43.633</u>	<u>19.460</u>
Dikurangi: bagian lancar	<u>(38.008)</u>	<u>(13.835)</u>
Bagian tidak lancar	<u>5.625</u>	<u>5.625</u>

b. Utang pajak

	2024	2023
PPh Badan	2.043	130
Pajak lainnya:		
- PPN	-	23.847
- PPh Pasal 15	32.440	19.283
- Lain-lain	870	1.736
Jumlah	<u>35.353</u>	<u>44.996</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)**c. Beban pajak penghasilan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	964.159	905.632
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(5.759.549)	(5.884.681)
Beban terkait pajak penghasilan final	4.847.591	5.012.619
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	<u>(26.196)</u>	<u>(15.890)</u>
Penghasilan kena pajak	<u>26.005</u>	<u>17.680</u>
Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:		
Beban pajak kini	<u>5.721</u>	<u>3.890</u>
Dikurangi pembayaran pajak di muka:		
- PPh Pasal 22	(1.601)	(1.014)
- PPh Pasal 23	(1.490)	(2.254)
- PPh Pasal 25	<u>(587)</u>	<u>(492)</u>
Kurang bayar pajak penghasilan badan	<u>2.043</u>	<u>130</u>

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut dapat disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pajak.

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak penghasilan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	964.159	905.632
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku (22%)	212.115	199.239
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final - setelah dikurangi beban terkait	(200.631)	(191.853)
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	<u>(5.763)</u>	<u>(3.496)</u>
Jumlah beban pajak penghasilan	<u>5.721</u>	<u>3.890</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)**d. Ketetapan pajak**

Jenis pajak	Tahun pajak	Surat pajak	Tanggal surat	Jumlah yang diperkarakan	Status
PPN, PPh badan dan lain-lain	2017	SKPKB dan Surat Tagihan Pajak	Februari - Desember 2019	Rp5.625	Permohonan Gugatan yang disampaikan pada Februari 2023

Manajemen telah melakukan analisis terhadap posisi perpajakannya dan berkeyakinan bahwa hasil akhir dari pemeriksaan pajak di atas tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Perusahaan.

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung dan menyetorkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

22. BEBAN KEUANGAN

	2024	2023
Liabilitas sewa	183.437	165.412
Pinjaman pemegang saham (Catatan 15)	62.565	65.670
Jumlah beban keuangan	246.002	231.082

Lihat Catatan 23 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**Sifat hubungan berelasi**

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat transaksi
PLN	Entitas Induk Utama	Piutang usaha, piutang non-usaha, piutang sewa pembiayaan, transaksi penjualan jasa, utang lain-lain, pinjaman jangka panjang, transaksi pembelian jasa beban keuangan, biaya yang masih harus dibayar
PLN EPI	Entitas Induk Perusahaan	Pemberi modal, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang, beban keuangan
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN	Pemegang saham Perusahaan	Pemberi modal
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan rekening bank
Bank Negara Indonesia	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan rekening bank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan rekening bank
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Syariah Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan rekening bank
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Entitas asosiasi PNP, entitas sepengendali dengan Perusahaan	Transaksi penjualan jasa, piutang usaha

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**Sifat hubungan berelasi (lanjutan)**

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat transaksi
PT PLN Nusantara Power ("PNP")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Piutang usaha, transaksi penjualan jasa
PT PLN Indonesia Power ("PIP")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Piutang usaha, utang lain-lain, transaksi penjualan jasa
PT Batu Bara Niaga ("BBN"), PT Jambi Prima Coal ("JPC")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Piutang usaha, transaksi penjualan jasa
AGP	Entitas asosiasi	Investasi pada asosiasi, piutang non-usaha, utang usaha, transaksi pembelian jasa, piutang usaha, transaksi penjualan jasa
PT Haleyora Powerindo ("HPI")	Entitas anak PT Haleyora Power, entitas sepengendali dengan Perusahaan	Utang lain-lain
PT PLN ICON Plus ("ICON")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Utang lain-lain, transaksi pembelian jasa
PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Sucofindo (Persero)	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Utang usaha, beban keuangan
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLN SC")	Entitas anak PNP, entitas sepengendali dengan Perusahaan	Transaksi pembelian jasa
PT PLN Nusantara Power Services ("PLN NPS")	Entitas anak PNP, entitas sepengendali dengan Perusahaan	Transaksi pembelian jasa, utang lain-lain
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Utang usaha, transaksi pembelian barang
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Transaksi pembelian jasa
PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara ("PLN MCTN")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Transaksi pembelian barang

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

	Catatan	2024	2023
Kas dan setara kas	4		
Bank Negara Indonesia		506.989	150.223
Bank Mandiri		304.687	156.067
Bank Rakyat Indonesia		272.933	122.226
Bank Syariah Indonesia		190.523	10.138
Jumlah		1.275.132	438.654

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)**

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Piutang usaha	5		
PIP		203.036	702.092
PLN		153.699	180.667
PNP		124.977	444.043
BBN		55.275	66.804
S2P		24.560	70.487
JPC		12.561	6.048
AGP		-	262
Jumlah		574.108	1.470.403
Piutang non-usaha	6		
PLN		24.502	24.286
AGP		16.071	84.298
Jumlah		40.573	108.584
Piutang sewa pembiayaan	8		
PLN		740.626	934.499
Utang usaha	12		
PT Pertamina Patra Niaga		66.928	81.245
AGP		21.215	42.240
PT Djakarta Lloyd (Persero)		-	7.041
PT Sucofindo (Persero)		-	192
Jumlah		88.143	130.718
Utang lain-lain	13		
PLN		6.371	6.926
PLN NPS		950	950
ICON		647	417
PIP		288	629
HPI		27	1.689
Jumlah		8.283	10.611
Biaya yang masih harus dibayar	14		
PLN		5.435	6.099
PLN EPI		382	217
Jumlah		5.817	6.316
Pinjaman jangka panjang	15		
PLN		588.542	667.653
PLN EPI		75.757	81.900
		664.299	749.553

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)**

	Catatan	2024	2023
Pendapatan usaha	19		
PIP		2.459.367	2.634.939
PNP		1.847.736	1.770.531
PLN		866.160	1.074.675
BBN		183.824	93.188
S2P		122.468	155.823
JPC		9.297	5.448
AGP		-	210
Jumlah		5.488.852	5.734.814
Beban pokok pendapatan	20		
PT Pertamina Patra Niaga		743.893	479.912
AGP		327.037	45.353
PLN MCTN		15.875	-
PLN NPS		3.799	4.694
PLN SC		-	2.345
Jumlah		1.090.604	532.304
Beban umum dan administrasi	20		
ICON		8.268	10.401
PLN		429	1.273
HPI		373	5.303
PLNE		-	1.356
Jumlah		9.070	18.333
Beban keuangan	22		
PLN		55.528	76.329
PLN EPI		7.037	216
PT Djakarta Lloyd (Persero)		-	2.775
Jumlah		62.565	79.320

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.357 dan Rp13.404. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan pascakerja jangka pendek.

24. PERJANJIAN PENTING**a. Pengangkutan batubara**

Kontrak signifikan pengangkutan batubara yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pelanggan	Tanggal perjanjian	Jumlah pengangkutan batubara per tahun (dalam metrik ton)	Periode perjanjian
PLN	27 Januari 2011	Sesuai kebutuhan	2011 - 2031
	29 Agustus 2012	3.600.000	2012 - 2032
	16 April 2021	Sesuai kebutuhan	2021 - 2031
S2P	10 September 2012	500.000	2012 - 2026
PIP	19 Maret 2013	2.780.885 - 5.200.000	2013 - 2025
PT Paiton Energy	1 Januari 2022	1.500.000	2022 - 2027

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
b. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (“BBM”)

Perusahaan melalui PLN dan PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) mengadakan Perjanjian Jual Beli BBM tanggal 16 Mei 2007. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Adendum VIII tanggal 8 Februari 2022, yang mengatur sebagai berikut:

1. Terhitung sejak 1 September 2021, seluruh tanggung jawab, hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian dialihkan kepada PT Pertamina Patra Niaga.
2. Menyepakati bahwa Perusahaan termasuk dalam lingkup fasilitas penunjang PLN terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023.
3. Perubahan formulasi harga BBM yang berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Perjanjian jual beli bahan bakar minyak dengan Pertamina telah berakhir pada 31 Desember 2023. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, Perusahaan melalui PLN telah menandatangani perjanjian jual beli bahan bakar minyak baru dengan Pertamina Patra Niaga mulai 1 Januari 2024.

Pada 12 Agustus 2024, Perusahaan melalui PLN telah memperbaharui perjanjian jual beli bahan bakar minyak No. 0026.PJ/EPI.01.03/PLNEPI0100/2024 dengan Pertamina Patra Niaga untuk periode 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024. Atas perjanjian ini sedang dilakukan amandemen untuk perpanjangan atas Kontrak Jangka Panjang Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak. Sebagai dasar pembelian bahan bakar minyak dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Maret 2025, Perusahaan melalui PLN telah menandatangani Kesepakatan Awal No. 0054.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 dan 0011.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2025.

c. Sewa kapal

Kontrak signifikan sewa kapal dengan pemberi sewa yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pemberi sewa	Tanggal perjanjian	Nama kapal	Periode perjanjian
JSK	27 Januari 2011	MV Kartini Samudera	2011 - 2025
IBP	27 Agustus 2021	MV Bulk Batavia	2021 - 2031
Lumoso	17 Oktober 2022	MV Lumoso Raya	2022 - 2027
PT Gurita Lintas Samudera	19 Juni 2023	MV Ammar	2023 - 2028
PT Pelita Bara Samudera & PT Prima Maritim Bahari	24 Februari 2023	MV Prima Sejahtera	2023 - 2028
		MV Prima Sentosa	2023 - 2028
PT Karunia Akses Gemilang	15 September 2022	MV Karunia Gemilang	2023 - 2028
PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi	30 Agustus 2023	TB Aubrey & BG Lily	2023 - 2025
	20 September 2023	TB Emma & BG Madison	2023 - 2025
PT Bintang Laut Sejahtera Sembilan Dua	5 September 2023	TB Bintang Laut 165 & BG Chandra 305	2023 - 2025
		TB Bintang Laut 166 & BG Chandra 306	2023 - 2025
PT Cakrawala Nusa Bahari	19 Oktober 2023	TB Linton 898 / BG Cakrawala V	2023 - 2025
		TB PBM 01 / BG Cakrawala VI	2023 - 2025
		TB PBM 989 / BG Cakrawala VIII	2023 - 2025
PT Pancaran Samudera Transport	6 September 2023	TB Pancaran 111 & BG PST 1111	2023 - 2025
	18 Oktober 2023	TB Pancaran 311 & BG PST 315	2023 - 2025
		TB Pancaran 211 & BG PST 610	2023 - 2025
		TB Pancaran 312 & BG PST 312	2023 - 2025
		TB Pancaran 512 & BG PST 215	2023 - 2025
PT Adhi Guna Putera & PT Titan Transport Indonusa	28 November 2023	MV AGP Kartini III	2023 - 2026

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, kas yang dibatasi penggunaannya dan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp2.720.212 (2023: Rp3.035.913) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa sebesar Rp3.071.521 (2023: Rp3.840.005) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo *item* moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

	2024	
	Dampak terhadap laba setelah pajak AS\$	
	+10%	-10%
Aset keuangan		
Kas dan setara kas	11	(11)
	2023	
	Dampak terhadap laba setelah pajak AS\$	
	+10%	-10%
Aset keuangan		
Kas dan setara kas	52	(52)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Per tanggal 31 Desember 2024, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Perusahaan hanya terekspos risiko tingkat suku bunga melalui saldo kas di bank dan pinjaman dari pemegang saham.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)****ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)****Sensitivitas tingkat suku bunga**

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") dengan semua variabel lainnya dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat suku bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika suku bunga mengalami kenaikan 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah Rp3.662 (2023: Rp3.662). Sebaliknya jika suku bunga mengalami penurunan 50 basis poin, dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak akan lebih tinggi Rp3.611 (2023: Rp3.673).

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan timbul terutama atas piutang usaha dari pelanggan. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas, Perusahaan mengelola rekening pada beberapa bank dengan reputasi baik dengan tujuan meminimalkan risiko kredit dan untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi. Perusahaan menempatkan dana pada beberapa bank yang kredibel (Catatan 4).

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk KKE mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit. Pada tanggal 31 Desember 2024, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp2.719.845 (2023: Rp3.035.512) yang terutama berasal dari kas dan setara kas di bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang non-usaha dan piutang sewa pembiayaan.

Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi karena meningkatnya eksposur risiko kredit.

Pelanggan Perusahaan adalah PLN grup. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit PLN rendah dimana Perusahaan telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN grup untuk sewa kapal dan tongkang.

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu. Kualitas kredit aset keuangan Perusahaan dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat internal.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)****iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)**

Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan Sistem Peringkat Perusahaan. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit dan Sistem Peringkat Perusahaan dinilai sebagai berikut:

(a) Tingkat tinggi

Aset keuangan tingkat tinggi meliputi kas dan setara kas di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh sebab itu, risiko kredit adalah minimal. Untuk piutang usaha, pelanggan maupun pihak berelasi dapat diberi peringkat tingkat tinggi jika tidak memiliki kesulitan keuangan, tidak terjadi pelanggaran kontrak, tidak ada pemberian keringanan dan memiliki kelangsungan usaha.

(b) Tingkat rendah

Aset keuangan peringkat rendah termasuk piutang usaha yang tidak diklasifikasikan sebagai tingkat tinggi. Untuk piutang usaha, pelanggan dapat diberi peringkat rendah jika pelanggan memiliki kesulitan keuangan, melakukan pelanggaran kontrak, menerima pemberian keringanan, dan tidak memiliki kelangsungan usaha.

Per 31 Desember 2024 dan 2023, kualitas kredit semua aset keuangan Perusahaan berada dalam klasifikasi tingkat tinggi.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan simpanan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan diwajibkan untuk membayar. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Perusahaan diwajibkan untuk membayar.

	2024				Jumlah
	Dalam satu tahun	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun	Lebih dari lima tahun	
Utang usaha	242.726	-	-	-	242.726
Liabilitas sewa	763.259	1.033.071	308.509	217.324	2.322.163
Utang lain-lain	27.198	-	-	-	27.198
Biaya yang masih harus dibayar	211.588	-	-	-	211.588
Pinjaman jangka panjang	163.453	380.269	287.034	86.188	916.944
Jumlah	1.408.224	1.413.340	595.543	303.512	3.720.619

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)****iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)**

	2023				Jumlah
	Dalam satu tahun	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun	Lebih dari lima tahun	
Utang usaha	703.555	-	-	-	703.555
Liabilitas sewa	657.778	1.499.308	289.765	362.207	2.809.058
Utang lain-lain	47.725	-	-	-	47.725
Biaya yang masih harus dibayar	62.834	-	-	-	62.834
Pinjaman jangka panjang	147.818	403.173	322.477	167.757	1.041.225
Jumlah	1.619.710	1.902.481	612.242	529.964	4.664.397

c. Manajemen modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

d. Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PSAK 113, "Pengukuran nilai wajar", mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- *Input* selain harga kuotasian dari pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	2024			
	31 Desember 2023	Arus kas masuk	Arus kas keluar	31 Desember 2024
Pinjaman jangka panjang kepada pemegang saham	749.553	-	(85.254)	664.299
Liabilitas sewa	<u>2.276.336</u>	-	<u>(464.555)</u>	<u>1.925.710</u>
Jumlah	<u>3.025.889</u>	-	<u>(549.809)</u>	<u>2.590.009</u>
	2023			
	31 Desember 2022	Arus kas masuk	Arus kas keluar	31 Desember 2023
Pinjaman jangka panjang kepada pemegang saham	692.251	297.606	(240.304)	749.553
Liabilitas sewa	1.336.096	-	(301.162)	2.276.336
<i>Notional Pooling</i>	<u>399.420</u>	-	<u>(399.420)</u>	-
Jumlah	<u>2.427.767</u>	<u>297.606</u>	<u>(940.886)</u>	<u>3.025.889</u>

27. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2025.